

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sub sektor pertanian adalah perkebunan. Perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian yang sangat penting karena dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah mengutamakan subsektor perkebunan, karena ia memiliki daya tarik yang tinggi untuk diekspor ke negara maju. Diyakini, upaya pembangunan pertanian melalui subsektor perkebunan dapat dilakukan melalui pengembangan kelembagaan petani. Kegiatan pengembangan kelembagaan dianggap sangatlah penting karena bertujuan untuk mendorong petani dalam mengorganisasikan dirinya agar terhimpun dalam suatu wadah usaha dengan mensinergiskan kekuatan/potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Mosher (1991) menyatakan bahwa lembaga pertanian adalah salah satu faktor pelancar pembangunan pertanian karena aktivitasnya sangat diperlukan oleh petani dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Terkait dengan pengembangan pertanian melalui sub sektor perkebunan, maka tanaman karet merupakan salah satu bahan baku industri Indonesia yang cukup penting. Perkebunan karet di Indonesia merupakan perkebunan terluas di dunia yang mana pada tahun 2019 luasnya mencapai 3,67 juta ha, atau 15 % dari luas total perkebunan (22,76 juta ha). Dari total perkebunan karet tersebut sebesar 85 % merupakan perkebunan rakyat (PR) dengan penyerapan tenaga kerja pada perkebunan karet lebih dari 2,3 juta jiwa dan tenaga kerjanya tersebar ke 25 propinsi (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2019).

Sementara dengan luasnya kepemilikan rakyat terhadap perkebunan (terutama kelapa sawit 2.356,9 ribu Ha, karet 2.767 ribu Ha, kelapa 3.735 Ha dan kakao 1081 ribu Ha) maka pada bulan Juni 2005 pemerintah telah menyepakati adanya program pengembangan perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dan kakao) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/05/06 dan Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK/12/06 serta penunjukan 16 bank pelaksana oleh Menteri Keuangan, diantaranya yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Sumut, Bank Nagari dll. Khusus untuk komoditas karet, pengembangan perkebunan rakyat di Indonesia melalui program revitalisasi hingga tahun 2013 mencapai 300.000 hektare, meliputi: perluasan

sebanyak 50.000 hektare dan peremajaan sebanyak 250.000 hektare. Program ini dilakukan dalam upaya pengembangan perkebunan rakyat dan lahan transmigrasi. Bagi wilayah yang tidak tersedia perusahaan mitranya maka pengembangan perkebunan dilakukan melalui koperasi (dengan tujuan membantu mengaktifkan koperasi didesa) dengan kegiatan pembinaannya dilakukan oleh Departemen Pertanian dan Dinas Perkebunan terkait, Selanjutnya pada tahun 2014 keatas, program revitalisasi lebih mengarah ke komoditi lainnya seperti sawit, coklat dan kelapa karena tanaman karet menuju ke tahap pembesaran dan peremajaan (Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2019).

Adapun salah satu penerima program pengembangan perkebunan karet adalah Propinsi Riau. Dimana dana program yang direalisasikan oleh pemerintah melalui Bank BRI dan disalurkan melalui koperasi karet, namun program belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh semua anggotanya yang bermatapencaharian karet. Realitas dilapangan memperlihatkan pemerintah menyalurkannya pada koperasi karet tertentu dalam memanfaatkan program ini (hal ini tentulah sangat mengkuatirkan karena koperasi-koperasi yang beranggotakan petani karet pada dasarnya tidak hanya terdapat di wilayah/kawasan tertentu saja sehingga upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengembangkan perkebunan karet rakyat dan mengaktifkan kegiatan koperasi telah menonaktifkan aktivitas koperasi-koperasi karet lain yang juga beranggotakan petani karet (baik jasa simpan pinjam, dan kegiatan rapat koperasi). Sementara petani-petani karet lainnya tentulah ingin memanfaatkan fasilitas jasa di koperasi yang telah ditentukan pemerintah. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius mengingat pada konsepnya koperasi dibentuk bukan untuk dikembangkan secara sentral/*topdown* dengan peran pemerintah lebih dominan. Namun koperasi merupakan wadah kegiatan ekonomi rakyat yang berdiri karena adanya anggota yang memiliki kepentingan yang sama, disepakati oleh anggota secara bersama-sama dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Disisi lainnya, Chalimah dan Akhmad (2015) menyatakan kedudukan anggota dalam koperasi merupakan penentu pengembangan koperasi karena anggota adalah sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa atau *dual identity*, sehingga anggota diharapkan berinteraksi seperti berpartisipasi secara penuh

terhadap kegiatan-kegiatan di koperasi. Peran pemerintah diharapkan sebagai fasilitator yang mendorong keaktifan anggota koperasi dan bukan mendominasi pada koperasi karet tertentu atau mematikan interaksi anggota dalam koperasi karet lainnya melalui program yang dibuatnya.

Peneliti terdahulu seperti Andika (2012), Anton (2015); Musliadi dkk (2014) dan lain-lainnya telah membahas koperasi secara umum dalam penelitiannya. Mereka menjelaskan bahwa tidak berkembangnya koperasi karena SHU tidak mendapatkan hasil yang maksimal, partisipasi anggota dan pemimpin serta kontribusi dan tujuan keberadaan koperasi kurang dirasakan oleh masyarakat meskipun program pembinaan telah dilakukan pemerintah daerah. Adapun penyelesaian masalah koperasi yang mereka rekomendasikan terkait hal tersebut adalah pendekatan ekonomi atau peningkatan pendapatan/SHU melalui bantuan dana pemerintah untuk membuat koperasi tetap aktif. Namun penyelesaian yang ditawarkan peneliti terdahulu tidak memberikan pengaruh terhadap perkembangan keaktifan koperasi secara umum terutama koperasi karet yang aktif di Propinsi Riau. Faktanya jumlah koperasi yang aktif di dua sentra karet Propinsi Riau yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar terus menurun. Sebelumnya tercatat jumlah koperasi karet yang aktif sampai pada tahun 2007 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 20 unit selanjutnya pada tahun 2014 menjadi 10 unit dan pada tahun 2018 hanya tinggal 2 unit koperasi karet yang aktif, sementara di Kabupaten Kampar tercatat tahun 2014 tercatat 6 unit koperasi karet yang aktif dan pada tahun 2018 hanya tinggal 1 unit koperasi karet yang aktif (Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuantan Singingi, 2019; Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, 2019)..

Berdasarkan paparan diatas maka rekomendasi yang ditawarkan oleh para peneliti sebelumnya berlawanan dengan teori Bapak koperasi M. Hatta (1987) yang menyatakan koperasi sangatlah berbeda dengan perusahaan. Ia didirikan untuk membantu kaum lemah dalam memenuhi keperluan hidupnya, organisasi ini mendahulukan keperluan anggotanya secara bersama-sama (terdapat hubungan sosial sesama anggota dan perangkat koperasi dalam koperasi) dan bukan keuntungan sebesar-besarnya. Beliau berpendapat di dalam koperasi

terdapat dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial. Sejalan dengan tokoh koperasi, Mubyarto (2003) juga menyebutkan bahwa selama ini pendekatan dalam memahami manajemen koperasi selalu dilakukan dengan dimensi ekonomi padahal koperasi identik dengan dimensi sosialnya seperti interaksi. Sependapat dengan Mubyarto, peneliti menduga interaksi antar stakeholder baik dalam dan luar koperasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan koperasi sehingga memberikan dampak terhadap ketidaksesuaian implementasi konsep dasar yang dijalankan koperasi dengan konsep pengembangan koperasi yang terdapat dalam UU, PP, Permen, Perda, Kepres atau proses kegiatan yang melibatkan elemen internal maupun eksternal koperasi akibatnya hal ini berpengaruh terhadap aktif atau tidak aktifnya koperasi.

1.2. Perumusan Masalah

Salah satu daerah potensial perkebunan karet rakyat di Indonesia adalah Propinsi Riau. Pada tahun 2013, Propinsi Riau memiliki lahan perkebunan karet seluas 505.264 ha dan pemerintah RI memusatkan daerah ini sebagai salah satu lokasi kegiatan peremajaan karet rakyat yang dibiayai oleh dana APBN pada tahun 2014. Adapun dua daerah yang diikutsertakan dalam kegiatan peremajaan dan menjadi wilayah andalan Provinsi Riau di sub-sektor perkebunan karet adalah Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar dan berdasarkan data BPS pada Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar, potensi perkebunan karet di kedua kabupaten ini dari tahun 2008 sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Lahan, dan Produksi Kadar Karet Kering di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Kabupaten Kampar.

Tahun	Luas Lahan (Ha)		Produksi Karet (ton)	
	Kuansing	Kampar	Kuansing	Kampar
2008	160.628	89.421	281.233,35	43.150
2009	151.909	101.131	208.321,66	67.523
2010	152.391	101.174	104.160,83	67.624
2011	152.466	101.342	55.617,72	67.624
2012	146.216	91.143	56.299,34	61.040
2013	146.475	101.966	71.149,53	60.714

Sumber : BPS Kabupaten: Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar (2014).

Tabel 1. memperlihatkan secara umum data luas lahan dan produksi karet mulai tahun 2008 sampai 2013 di dua kabupaten baik Kuantan Singingi (Kuansing), dan Kampar mengalami fluktuasi. Pada Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2008 sampai 2013 memperlihatkan luas lahan karetnya mengalami penurunan dari 160.628 ha menjadi 146.475 ha dan demikian juga produksi karetnya turun dari 281.233,35 ton menjadi 71.149,53 ton. Untuk Kabupaten Kampar, pada tahun 2008 luas lahan karetnya berfluktuasi juga yang mana makin meningkat dari 89.421 ha menjadi 101.342 ha pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 91.143, dan naik kembali pada tahun 2013 menjadi 101.966 ha, sementara produksi karetnya pada tahun 2008 adalah 43.150 ton dan makin naik sampai pada tahun 2011 menjadi 67.624 ton dan menurun kembali sampai 2013 yaitu 60.714 ton. Padahal, sejak tahun 1980-an, penanaman tanaman karet sudah dilakukan oleh masyarakat kabupaten ini (baik Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Kampar). Untuk mengatasi penurunan luas lahan dan produksi karet karena usia pohon karet yang semakin tua, alih fungsi lahan perkebunan karet menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, perkembangan pemukiman dan sebagainya maka pemerintah Provinsi Riau membantu dua Kabupaten ini untuk mendapatkan anggaran pengembangan dan peremajaan perkebunan karet rakyat/revitalisasi.

Menurut Dinas Perkebunan Propinsi Riau (2014), program pengembangan perkebunan khusus karet telah dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sejak tahun 1980 sampai sekarang, sementara Kabupaten Kampar dan INHU sudah dimulai sejak tahun 1993. Untuk penempatan dana pengembangan perkebunan karet dilakukan melalui koperasi yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten pada tahun 2008 sampai 2013. Kegiatan pengembangan tanaman karet di Riau telah menghabiskan anggaran sebanyak 600 juta rupiah dengan realisasi dana sebesar 74,8 % dan luas lahan yang terolah 90,12 % atau 350 ha (Kabupaten Kuantan Singingi 200 ha, Kampar 150 ha). Sementara, pada tahun 2014, sudah tidak ada bantuan pengembangan perkebunan karet yang dilakukan melalui koperasi karet.

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Riau (2019) tercatat jumlah koperasi yang aktif pada Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar

berturut-turut adalah 277, dan 487 unit, sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif secara berturut-turut adalah 145, dan 184 unit. Khusus koperasi karet yang aktif di Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kampar masing-masing hanya tinggal satu unit. Sebelumnya tercatat jumlah koperasi karet yang aktif sampai pada tahun 2007 di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 20 unit selanjutnya pada tahun 2014 menjadi 10 unit dan pada tahun 2018 hanya tinggal 2 unit koperasi karet yang aktif, sementara di Kabupaten Kampar tercatat tahun 2014 tercatat 6 unit koperasi karet yang aktif dan pada tahun 2018 hanya tinggal 1 unit koperasi karet yang aktif.

Berbagai penelitian terdahulu baik kuantitatif dan kualitatif seperti Arnawa dkk. (2014), Suskaniah dkk. (2015), Hosekini (2015), Lestari (2016) dan lainnya menyampaikan faktor penentu aktif tidaknya suatu koperasi yaitu: keuntungan usaha koperasi dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha), sedangkan Mulyani (2013), Amiruddin dan Farida (2014), Kusmiati (2015), Farida (2015) dan lainnya menyampaikan solusi pengembangan koperasi agar selalu berjalan aktif yaitu melalui peningkatan pelayanan terhadap anggota. Lebih lanjut, penelitian Satria (2013), Putri (2014), Utami, dkk.(2015), Sulistyowati (2015) dan lainnya mengaitkan faktor partisipasi pengurus maupun anggota secara terpisah sebagai aspek penentu berkembangnya suatu koperasi. Selanjutnya, peneliti yang mengaitkan dan menggambarkan manajemen secara umum sebagai pokok bahasan terpenting bagi penentu pengembangan koperasi diantaranya, Muchamad (2012), Mujahidin (2012), Wulan (2015).

Selanjutnya, peneliti koperasi lainnya seperti: Noor (2014), Hidayah (2015), Odhiansyah (2016), Kharisma (2016) dan lainnya mengkaji pengembangan koperasi melalui persepsi individu melalui sikap personal terhadap elemen lainnya secara terpisah/tidak menyeluruh atau terstruktur untuk semua elemen koperasi (seperti persepsi anggota terhadap karakter personal pengurus dalam memimpin atau persepsi anggota terhadap karyawandalam melayaninya). Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan koperasi baik aktif atau tidak aktifnya suatu koperasi banyak dikaitkan dengan aspek SHU, pelayanan, manajemen dan partisipasi anggota terhadap pengurus dan karyawan, akibatnya secara empiris,

kajian pengembangan koperasi banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui pendekatan ekonomidan sangat kurang dengan pendekatan sosiologi (terkait interaksi).

Disisi lainnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk koperasi juga mengutamakan penilaian ekonomi seperti: aspek modal, kualitas aktiva produktif, manajemen dan efisiensi penggunaan aset dari rasio biaya operasional,aktiva dan pelayanan. Akibatnya, kegiatan koperasi yang dilakukan bersama seperti *relationship* dalam bentuk interaksi sosial atau proses sosial antar setiap perangkat koperasi dan luar koperasi tidak dikaji secara mendalam sehingga penulis masih menemukan karakter antar elemen pada ruang yang kosong pada penelitian kelembagaan dan diluar kelembagaan koperasi. Penulis mendugapendekatan sosiologi perlu dikedepankan dalam meneliti koperasi karena koperasi sangat tergantung pada proses sosial yang dilakukan perangkatnya atau kemampuan dalam membangun kondisi internal dan eksternal yang ada didalam dan diluar lembaganya seperti interaksi social atau hubungan timbal balik yang terjalin antar sesama *stakeholder*(elemen didalam/diluar koperasi).

Mengetahui hubungan sosial pada setiap *stakeholder* (interaksi sosial antar kelompok elemen internalkoperasi dan interaksi sosial antar elemen internal dengan eksternal koperasi) merupakan kajian yang penting untuk dipelajari. Selama ini, Mubyarto (2003) mengatakan bahwa mempelajari koperasi selalu dilakukan dengan pendekatan ekonomi saja dan masih kurang penjelasan-penjelasan koperasi melalui pendekatan sosial sehingga perlu digali sumbangan ilmu-ilmu sosial diluar ilmu ekonomi diantaranya sosiologi, antropologi, ilmu politik dan lain-lain. Lebih lanjut, Abdullah (1992) dan Garlans (2015) menjelaskan bahwa kekurangan dari ilmu ekonomi adalah menyepelekan aspek sosial dan sosiologis sehingga fakta yang didapatkan menjadi kurang optimal.

Oleh sebab itu, penelitian aktif atau tidaknya pengembangan koperasi dalam pembangunan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar ini sangat perlu dilakukan dengan pendekatan sosiologi pada aspek interaksi sosial yang dikaitkan dengan proses sosial yang dilakukannya. Dan jika pendekatan ini tidak diperhatikan secara mendalam maka bukanlah hal yang tidak mustahil jika perilaku sosial antar *stakeholder* (elemen internal koperasi dan antar

elemen internal koperasi dengan eksternal koperasi) yang telah berjalan akan menyimpang ke perilaku rasionalitas yang tentu juga menyebabkan penyimpangan terhadap konsep dasar dan nilai-nilai koperasi sebagai falsafah sosial bagi konsep koperasi sebenarnya seperti dicetuskan UU No.25 Tahun 1992 (mengacu pada prinsip dan nilai koperasi menurut ICA (2002) dan Hatta (1987)).

Diketahui koperasi secara etimologi berasal dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Secara lengkap, pada koperasi terdapat pengertian *cooperation* artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dari pengertian diatas maka terlihat bahwa terdapat makna sosiologis pada pengertian koperasi. Didalam koperasi terdapat sekumpulan/sekelompok orang-orang atau elemen yang terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan yang berinteraksi menjalankan aturan/konsep guna mencapai tujuan bersama sehingga berdasarkan kajian ini maka perlu diteliti implementasi konsep dasarnya (apakah konsep koperasi ini sudah berjalan/tidak sesuai dengan konsep idealnya).

Dengan demikian, maka berbicara aktif atau tidak aktifnya koperasi tidak boleh lepas dari *existing relationship* yang artinya konsep interaksi sosialnya /hubungan antar elemen koperasi (baik anggota, pengurus, pengawas, manajer dan karyawan). Semakin kuat interaksi sosial antar elemen-elemen internal koperasi maka semakin aktif koperasinya, karena kekuatan hubungan antar elemen-elemen koperasi inilah yang akan menjadi konsep ideal koperasi dan hal yang akan menentukan aktif atau tidak aktifnya koperasi tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Dr. C.C. Taylor (1950) bahwa koperasi adalah konsep sosiologi, didalam koperasi ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama yaitu: a.pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang bersifat pribadi. b.manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai daripada persaingan. Dimana koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal. Pernyataan ini diperkuat Gillin dan Gillin (1954) yang menyampaikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi yang timbul didalam masyarakat. Sementara, interaksi adalah proses-proses sosial yaitu cara

berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Didalam pendekatan sosiologi terdapat hubungan-hubungan sosial yang dinamis baik hubungan antara orang-orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia, sementara proses sosial yang timbul akibat adanya hubungan sosial berupaproses asosiatif (berupa: kerja sama, akomodasi dan asimilasi.) dan proses disosiatif (berupa persaingan, kontraversi, pertikaian/konflik). Disamping Gillin dan Gillin (1954), Mutis (1992) juga memperkuat pernyataan Taylor yang menyatakan bahwa hubungan antara elemen koperasi baik anggota, pengurus, badan pemeriksa, manager akan memacu sinergi koperasi untuk berkembang, sehingga berdasarkan pokok persoalan diatas maka secara komprehensif dapat dirumuskan pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsepsi pengembangan koperasi karet dan implementasinya yang sudah ada dan sudah berjalan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar pada koperasi yang aktif dan tidak aktif.
- b. Bagaimana kondisi interaksi sosial dengan pendekatan sosiologi antar stakeholder pada koperasi yang aktif dan tidak aktif.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara berurutan tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi konsep-konsep dasar koperasi dalam pengembangan koperasi karet rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar.
2. Menganalisis kondisi interaksi sosial antar setiap stakeholder koperasi baik elemen internal dan eksternal koperasi karet yang aktif dan tidak aktif drngan pendekatan sosiologi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat dari sisi teori:

Untuk mendapatkan pemikiran baru terkait inovasi pengembangan kelembagaan koperasi karet berupa konsep dasar yang dilandaskan oleh upaya membangun dan meningkatkan interaksi sosial antar anggota koperasi karet agar terbentuknya koperasi yang lebih aktif.

2. Manfaat dari sisi kebijakan:

Untuk memberikan informasi bagi pemerintah Riau umumnya dan pemerintah daerah Kuantan Singingi dan Kampar khususnya untuk membuat kerangka konseptual dalam mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan koperasi karet.

1.5. Preposisi Penelitian

- a. Implementasi konsep dasar koperasi akan menyebabkan koperasi karet menjadi aktif dan berkembang.
- b. Interaksi sosial penting agar koperasi dapat aktif dan berkembang.

